

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diterapkan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan mendorong perkembangan ekonomi di tingkat lokal. Pembangunan merupakan upaya atau serangkaian kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan serta dijalankan secara disengaja oleh suatu negara dan pemerintah untuk memajukan dan membangun masyarakatnya (Sahur et al., 2023). Dikarenakan setiap negara tidak dapat mencapai tujuan nasionalnya tanpa terlibat dalam kegiatan pembangunan, proses pembangunan harus terus berlangsung karena tingkat kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat bersifat relatif dan tidak akan pernah terwujud secara mutlak.

Pertumbuhan ekonomi di tingkat regional melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dengan tujuan menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam area tersebut (Baransano et al., 2020).

Dalam menjalankan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan dukungan finansial untuk memajukan inisiatif

pembangunan di wilayahnya sendiri, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan nasional. Karena itu, perkembangan global yang cepat akan memiliki dampak signifikan pada kondisi ekonomi Indonesia, dan hal ini secara langsung akan mempengaruhi kemampuan negara dalam menghasilkan penerimaan untuk membiayai kebutuhannya.

Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan dalam upaya pembangunan ekonomi. Secara prinsip, pembangunan nasional harus diselaraskan dengan kapabilitas ekonomi di tingkat regional tertentu. Elemen-elemen kekuatan yang dimiliki oleh suatu wilayah bisa berasal dari kelebihan sumber daya manusia atau sumber daya alam yang menonjol sebagai karakteristik khusus wilayah tersebut, sehingga mampu membedakannya dari daerah lain (Nur'aini & Utomo, 2023).

Pengembangan potensi daerah tidak terlepas dari konsep otonomi daerah atau kebijakan lokal yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang ini, setiap daerah diberi kebebasan untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan mengembangkan wilayahnya, termasuk dalam upaya menggali potensi daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan tersebut menyatakan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri demi pengembangan dan optimalisasi potensi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten dimulai dengan transfer sejumlah urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah setempat. Penyerahan berbagai kewenangan harus disertai dengan pengalihan pembiayaan. Untuk

menjalankan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dibutuhkan kewenangan dan kemampuan untuk menghasilkan sumber keuangan sendiri. Ini perlu didukung oleh keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota, yang menjadi syarat dalam sistem pemerintah daerah. Peran penting pendapatan asli daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di suatu wilayah didasarkan pada prinsip otonomi yang efisien, komprehensif, dan bertanggung jawab sepenuhnya (Leilani Laksmi Mulya & Wulandari, 2023).

Analisis mengenai keberlanjutan keuangan wilayah dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang mencerminkan kapasitas keuangan daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan secara independen (Nurazhari & Aswat, 2023). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka tingkat kemandirian daerah tersebut akan semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial dalam menentukan kapabilitas suatu daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dan merancang serta melaksanakan program Pembangunan (Hidayah & Ghazalah, 2020). Dengan kata lain, tingkat Pendapatan Asli Daerah mencerminkan daya dukung finansial yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan kebijakan publik.

Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih atau kekurangan pendanaan dalam suatu bidang pemerintahan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan

yang menjadi wewenang Daerah diatur agar dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan pelaksanaan prinsip dekonsentrasi pada penyelenggaraan pemerintahan dilakukan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara biaya penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari tugas pembantuan dibiayai oleh anggaran pada tingkat pemerintahan yang memberikan tugas tersebut (Guntur & Madalina, 2022). Pemerintah diharapkan dapat bersiap-siap untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam menggali sumber-sumber keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah sehingga potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih optimal.

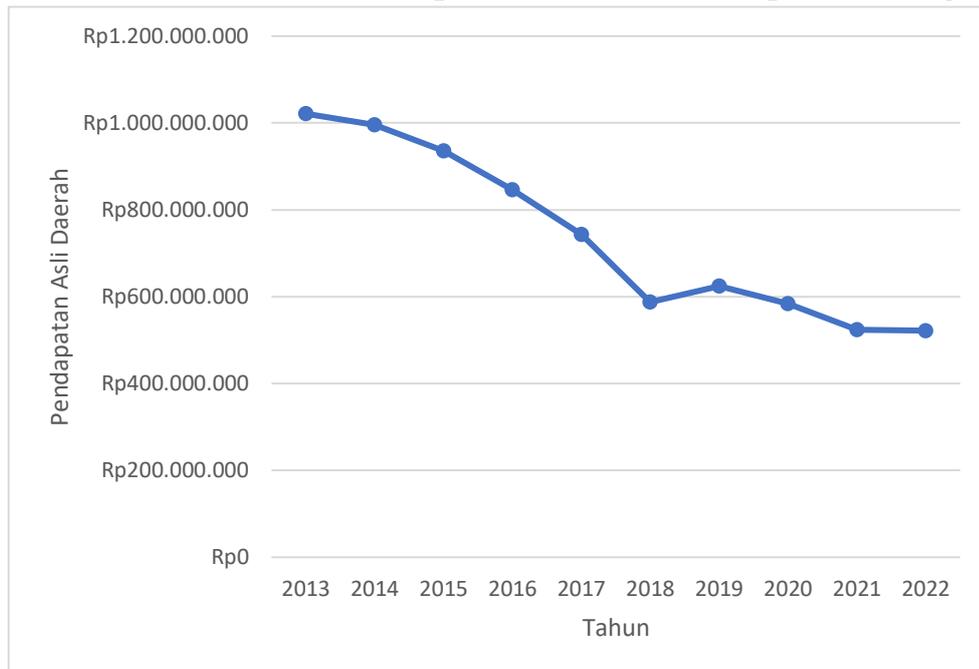
Ukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Perbedaan dalam potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dapat mengakibatkan disparitas dalam pendapatan yang terkumpul. Fenomena ini menciptakan kesenjangan dan tingkat penerimaan yang relatif rendah di antara berbagai daerah, sementara ketergantungan pada bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat tetap tinggi. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil menjadi sumber utama penerimaan daerah, sedangkan proporsi PAD masih cenderung kecil. Berdasarkan berita malangtimes.com di Kabupaten Malang, realisasi PAD masih rendah, hanya 77,63 persen dari target 2022 <https://www.malangtimes.com/baca/291392/20230620/065200/capaian-rendah-dewan-desak-pemkab-malang-lakukan-pendataan-potensi-pad>. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu secara optimal memanfaatkan berbagai sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD menjadi salah satu parameter untuk menilai keberhasilan implementasi otonomi daerah (Haeriyanto et al., 2021). Sedangkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah setelah diberlakukan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan, diharapkan bahwa daerah mampu secara independen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi di masa depan. Peningkatan PAD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, selain dari dana yang diterima dari pemerintah pusat. Meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi penopang untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah (Saputri, 2019). Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD, tingkat kualitas otonomi daerah juga meningkat, sehingga daerah tersebut menjadi semakin mandiri dalam aspek keuangan.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang selama periode 2013-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, nilai PAD mencapai Rp 1.021.256.992. Namun, hingga tahun 2022, total penerimaan menurun drastis menjadi Rp 521.871.085, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang



Sumber : Badan Pusat Statistik 2023, Data Diolah

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang pada tahun 2013 sampai tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan sampai dengan Rp 587.620.000 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 realisasi anggaran sedikit meningkat sebesar Rp 623.808.877. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2022 kembali mengalami penurunan sampai dengan Rp 521.871.085 pada tahun 2022.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan APBD Kabupaten Malang, diharapkan bahwa besarnya pendapatan tersebut dapat melebihi penerimaan yang diterima dari Pemerintah Pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Salah satu indikator kemajuan pembangunan ekonomi adalah melihat besarnya Produk Domestik Regional Bruto. Ini dikarenakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan

kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan cara ini, Kabupaten Malang dapat meningkatkan kapasitas keuangannya untuk mendukung pengeluaran pembangunan.

Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor perekonomian yang memiliki potensi di Kabupaten Malang. Sektoral ekonomi mencerminkan PDRB, yang merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang terkait dengan 17 sektor yang berkontribusi. Peran kontribusi Pendapatan Asli Daerah menjadi kunci dalam meningkatkan keuangan daerah, sehingga tidak terus-menerus tergantung pada pemerintah pusat. Dengan demikian, upaya ini dapat meningkatkan nilai PDRB Kabupaten Malang dan pada gilirannya, mempercepat laju perekonomian di daerah tersebut.

Dari total 17 sektor yang ada, beberapa memiliki potensi untuk menjadi sektor basis atau sektor yang berpotensi di Kabupaten Malang. Pemanfaatan sektor-sektor potensial ini, dengan mengekspor hasilnya ke daerah lain, dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang pada gilirannya dapat memastikan pemenuhan kebutuhan keuangan daerah secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Malang. Untuk menilai dampak sektor-sektor potensial di daerah tersebut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Pengaruh Sektor-Sektor Potensial Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang."***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Sektor-sektor apa saja yang dapat diidentifikasi sebagai sektor potensial di Kabupaten Malang?
2. Sektor apa saja yang termasuk dalam sektor maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Malang?
3. Apakah terdapat pengaruh sektor potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sektor potensial yang terdapat di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui sektor yang termasuk dalam sektor maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sektor potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam studi ini, ruang lingkup wilayah yang digunakan adalah Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang dan sektor-sektor potensial yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai variabel bebas.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Untuk mengetahui pengaruh sektor-sektor potensial terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sumber data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Malang, dan Portal data APBD Kementerian Keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada pemerintah Kabupaten Malang dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.
2. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan berfungsi sebagai acuan untuk penelitian mendatang guna mengatasi kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan manfaat sebagai sumber informasi tentang aspek yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang.